

Potensi dan Hambatan Internalisasi Nilai Harmonisasi Sosial Melalui Pembelajaran PPKn di Wilayah Rawan Konflik

Yuliatin*, Mursini Jahiban, Muhammad Mabror Haslan

Program Studi PPKn, Universitas Mataram

*Corresponding Author:
Yuliatin, Program Studi PPKn,
Universitas Mataram;
Email: hjyuliatin3@gmail.com

Abstract: Lombok sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki intensitas konflik yang cukup tinggi dan potensial. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus ambil bagian dalam upaya pencegahan dengan melakukan internalisasi nilai harmoni sosial melalui berbagai mata pelajaran yang ada, termasuk mata pelajaran PPKn. Terkait hal tersebut telah dilakukan penelitian dengan tujuan dan target khusus yaitu teridentifikasi dan terpetaknya potensi dan hambatan internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn SMP di wilayah rawan konflik di Lombok. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah SMP yang berada di wilayah rawan konflik di Lombok. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn meliputi: (1) potensi kurikulum, (2) potensi kearifan lokal yang sesuai dengan nilai harmoni sosial sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn. Sementara itu, hambatannya adalah: (1) kurangnya kompetensi guru, (2) keterbatasan sarana pembelajaran, (3) kurangnya kesiapan belajar siswa, (4) kurangnya dukungan keluarga siswa.

Keywords: Nilai Harmoni Sosial, Pembelajaran PPKn

Pendahuluan

Lombok sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki intensitas konflik yang cukup tinggi dan potensial. Konflik yang pernah terjadi antara lain konflik antar warga desa di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 17 Mei 2012, konflik antar warga di Kelurahan Monjok Mataram pada tanggal 1 Januari 2018, konflik antar kampung di Kelurahan Pagutan Kota Mataram pada tanggal 1 Juli 2018. Konflik tersebut disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari persoalan agama, adat, budaya, bahkan politik. (Reskrim Polda NTB, 2018).

Kondisi tersebut tentunya harus menjadi perhatian semua pihak terutama lembaga pendidikan formal, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam upaya melakukan pencegahan agar masalah yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang dibelajarkan di dalamnya, terutama mata pelajaran yang berorientasi pada internalisasi nilai, antara lain mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini sesuai dengan pendapat Khilmiah (2005) yang menggambarkan dimensi PPKn secara makro, antara lain dimensi nilai kewarganegaraan, yaitu

materi pembelajaran yang diarahkan untuk menanamkan nilai, kepercayaan, serta sikap kewarganegaraan yang baik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka seharusnya pembelajaran PPKn dirancang dan dilaksanakan tidak hanya untuk membangun pengetahuan tetapi juga sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai, termasuk nilai harmoni sosial. Dengan demikian, pembelajaran PPKn berkontribusi dalam menyiapkan siswa sebagai bagian dari anggota masyarakat yang senantiasa dapat hidup berdampingan secara damai (harmonis). Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya bukanlah sesuatu yang mudah. Disatu sisi ada potensi, dan sisi lain tidak lepas dari adanya hambatan. Oleh karena itulah, dalam tulisan ini dijelaskan hasil penelitian terkait dengan potensi dan hambatan internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn, khususnya di SMPN yang ada di wilayah rawan konflik di Lombok.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena perhatian utama penelitian adalah menganalisis suatu

fenomena atau peristiwa sosial, dalam hal ini adalah potensi dan hambatan internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn SMP di wilayah rawan konflik di Lombok. Informan penelitian adalah kepala sekolah, guru PPKn, dan juga siswa di SMP yang ada di wilayah rawan konflik yang menjadi sampel lokasi penelitian, yaitu SMP 23 Mataram dan SMPN 1 Pujut. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1984), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil dan Pembahasan

Potensi Internalisasi Nilai Harmoni Sosial Melalui Pembelajaran PPKn SMP di Wilayah Rawan Konflik di Lombok.

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn SMP di wilayah rawan konflik di Lombok, meliputi:

a. Potensi Kurikulum

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran di SMP memiliki berbagai Kompetensi Dasar (KD) yang menunjukkan potensi internalisasi nilai harmoni sosial. KD dimaksud antara lain KD kelas IX, meliputi : (1) KD 1.4; Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, (2) KD 2.4; Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya, (3) KD 3.4: Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Keberadaan KD mata pelajaran PPKn tersebut menunjukkan orientasi pada internalisasi nilai harmoni sosial, yakni nilai toleransi dalam keberagaman, baik keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat. Dengan demikian KD tersebut menjadi potensi yang mengharuskan guru PPKn untuk mengembangkan pembelajaran berbasis internalisasi nilai harmoni sosial. Hal ini

dikarenakan KD tersebut menunjukkan orientasi pada upaya membangun pengetahuan tentang prinsip persatuan dalam keberagaman. Dalam proses membangun pengetahuan tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberikan dampak pada terbangunnya sikap menghormati keberagaman, serta mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman.

Orientasi KD tersebut seiring dengan tahapan internalisasi nilai sebagaimana dikemukakan Muhaimin (2005) meliputi tahap transpormasi nilai, tahap transaksi nilai, dan tahap transinternalisasi. Kaitannya dengan upaya pencapaian KD tersebut maka tahap transpormasi nilai dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan berbagai informasi terkait nilai toleransi dalam keberagaman sebagai bagian dari nilai harmoni sosial. Selanjutnya, tahap transaksi nilai dapat dilakukan dengan membangun keyakinan siswa bahwasanya nilai toleransi sebagai bagian dari nilai harmoni sosial menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang beragam untuk terwujudnya masyarakat yang harmonis/damai. Tahap akhir adalah transinternalisasi, yakni menjadikan nilai toleransi yang merupakan bagian dari nilai harmoni sosial menjadi keperibadian yang terwujud dalam perilaku keseharian siswa yang senantiasa dapat hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman.

Internalisasi nilai sebagai basis kurikulum PPKn tentunya menjadi keniscayaan di tengah kebutuhan kehadiran lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan karakter sebagaimana dikemukakan Tilaar (1989) bawa lembaga pendidikan harus menjadi pelopor perubahan kebudayaan secara total yaitu bukan hanya nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tempat persemaian dari pengembangan nilai-nilai moral kemanusiaan.

b. Potensi Kearifan Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Suku Sasak umumnya, termasuk masyarakat di wilayah rawan konflik di Lombok memiliki kearifan lokal dalam berbagai bentuk yang syarat dengan nilai-nilai harmoni sosial di dalamnya sehingga menjadi potensi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn untuk internalisasi nilai harmoni sosial. Kearifan lokal dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk kearifan lokal

No.	Bentuk Kearifan Lokal	Contoh
1	Tradisi dan stem nilai	Saling Jot (saling memberi atau mengantarkan makanan) Saling Pesilaq (saling undang untuk suatu hajatan keluarga)

No.	Bentuk Kearifan Lokal	Contoh
(khususnya tradisi dan sistem nilai sebagai pengikat silaturahmi masyarakat Suku Sasak)	Saling Langar (saling layat jika ada kerabat/ sahabat yang meninggal)	Saling Ayoim (saling mengunjungi)
	Saling Ajinan (saling menghormati atau saling menghargai terhadap perbedaan, menghargai adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu)	Saling Jangoq (silaturahmi saling menjenguk jika ada di antara sahabat sedang mendapat musibah)
	Saling Bait (saling ambil dalam adat perkawinan)	Saling Ayo (saling balas silaturahmi, kunjungan karena kedekatan-persahabatan)
	Saling Sapa' (saling tegur sapa jika bertemu atau bertatap muka antar seorang dengan orang lain dengan tidak membedakan suku atau agama)	Saling Saduq (saling mempercayai dalam pergaulan dan persahabatan, terutama membangun peranakan Sasak Jati (persaudaraan Sasak sejati) di antara sesama sanak (saudara) Sasak dan antar orang Sasak dengan batur luah (non Sasak),
	Saling Iingan/Peringet, yaitu saling mengingatkan satu sama lain antara seseorang (kerabat/sahabat) dengan tulus hati demi kebaikan dalam menjamin persaudaraan/silaturahmi	Saling Peliwat (suatu bentuk menolong seseorang yang sedang membutuhkan)
	Saling Liliq (suatu bentuk menolong kawan dengan membantu membayar hutang tanggungan sahabat atau kawan, dengan tidak memberatkannya dalam bentuk bunga atau ikatan lainnya yang mengikat)	Saling Sangkul/Sangkol (saling menolong dengan memberikan bantuan material terhadap kerabat/sahabat yang membutuhkan)
	Saling Tulung (saling tolong menolong dalam berbagai kegiatan)	2 Ungkapan tradisional
	Adeqta tao jauq aiq (supaya kita dapat membawa air). Maknanya bahwa dalam suatu perselisihan atau pertengkaran yang sedang terjadi dan memanas, kita harus mampu menjadi pendingin)	Besual cara anak kemidi (bertengkar cara anak sandiwara atau jelasnya bertengkar seperti cara pemain sandiwara (maknanya boleh saja kita berselisih pendapat, tetapi tidak boleh menyimpan dendam)
	Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau, Air/tetap jernih teratai/tetap utuh, ikan pun di dapat/ tertangkap (mengandung makna bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu perselisihan, diupayakan agar suasana tetap tenang, masyarakat tidak panik, lingkungan masyarakat tidak terganggu, masalah atau perselisihan terselesaikan dengan damai)	

Berbagai tradisi dan ungkapan tradisional masyarakat Sasak sebagaimana pada tabel di atas menjadi bagian dari kearifan lokal karena tradisi dan ungkapan tradisional tersebut sesungguhnya merupakan cerminan pengetahuan, keyakinan, yang terimplementasi menjadi kebiasaan atau etika dalam tata kehidupan bersama di tengah keberagaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Keraf (2010) bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Tradisi masyarakat Sasak sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Sasak sesungguhnya sangat mengutamakan nilai harmoni sosial. Tradisi tersebut merupakan cerminan cara pandang masyarakat yang sekaligus merupakan dasar bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Mattulada dalam Lubis (2001) bahwa kearifan lokal merupakan wawasan atau cara pandang menyeluruh yang bersumber dari tradisi kehidupan. Selain itu, juga sesuai dengan pendapat Ridwan (2007) bahwa kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

Kearifan lokal tersebut tentunya sangat penting diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn agar dapat diketahui dan diwariskan kepada generasi berikutnya agar menjadi pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian tentunya akan terwujud harmoni sosial dalam masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam berbagai bentuk kearifan lokal tersebut terkandung ajaran-ajaran dan nilai-nilai tradisional/kearifan tradisional tentang persamaan, kebersamaan, persaudaraan, dan perdamaian.

Kearifan lokal tersebut tentunya dapat diintegrasikan dalam pembelajaran untuk internalisasi nilai harmoni sosial, antara lain pada KD kelas IX, meliputi : (1) KD 1.4; Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, (2) KD 2.4; Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya, (3) KD 3.4; Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

2. Hambatan Internalisasi Nilai Harmoni Sosial Melalui Pembelajaran PPKn SMP di Wilayah Rawan Konflik di Lombok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain menunjukkan potensi, juga menunjukkan adanya hambatan dalam internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn di wilayah rawan konflik di Lombok. Hambatan dimaksud meliputi:

a. Kurangnya Kompetensi Guru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, guru PPKn di wilayah rawan konflik belum optimal dalam mengembangkan pembelajaran PPKn yang berorientasi pada internalisasi nilai harmoni sosial. Pembelajaran lebih banyak diorientasikan dalam membangun pengetahuan seperti apa yang tertera pada buku teks untuk guru dan siswa yang berlaku secara nasional. Pembelajaran PPKn di wilayah rawan konflik kurang berkontribusi dalam menyiapkan siswa sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan nilai harmoni sosial.

Kondisi sebagaimana di atas disebabkan karena guru PPKn di wilayah rawan konflik tidak melakukan pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada internalisasi nilai harmoni sosial. Hal tersebut tidak dilakukan karena guru yang bersangkutan belum memahami potensi serta upaya pengembangan pembelajaran PPKn untuk internalisasi nilai harmoni sosial.

Hal di atas merupakan cerminan keberadaan guru PPKn di wilayah rawan konflik yang belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam UU tersebut pada pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Selanjutnya kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Sementara itu, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Terkait ketentuan tentang kompetensi guru sebagaimana di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn di wilayah rawan konflik terkait dengan kompetensi pedagogik, yakni guru PPKn kurang kompeten dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada internalisasi nilai, termasuk nilai harmoni sosial.

Sebagian guru PPKn bahkan tidak mengembangkan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Perangkat yang mereka sediakan hanyalah formalitas untuk kebutuhan pengawasan dan akreditasi. Perangkat tersebut mereka dapatkan dari internet. Sementara itu, sebagian guru PPKn lainnya mengembangkan perangkat pembelajaran PPKn melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn, namun juga belum diorientasikan untuk internalisasi nilai, termasuk nilai harmoni sosial. Kondisi tersebut tentunya berdampak pada kurangnya kualitas pembelajaran PPKn dalam upaya internalisasi nilai harmoni sosial.

Dalam hal ini, dibutuhkan guru yang memiliki kemampuan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memberi peluang bagi siswa untuk berinteraksi, belajar memahami norma-norma sosial, belajar bekerjasama, belajar menghargai dan belajar berbagai aspek kehidupan sebagaimana layaknya dalam masyarakat. Hal ini beranjak dari suatu filosofi sebagaimana dalam supriyadi (1998) bahwa setiap anak dikaruniai benih untuk bergaul, bahwa setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakekatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Terkait hal ini, Joan (1992) menegaskan bahwa peranan guru sulit digantikan oleh yang lain.

Mencermati pendapat tersebut maka, dalam proses pembelajaran di kelas, guru PPKn tidak cukup hanya berbekal pengetahuan berkenaan substansi/isi PPKn, akan tetapi sangat penting memiliki kemampuan untuk menyiapkan kondisi pembelajaran sedemikian rupa sehingga mampu mendorong berkembangnya aspek-aspek nilai di kalangan siswa.

b. Kurangnya Ketersediaan Sarana Pembelajaran

Dalam upaya internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn tentunya diperlukan ketersediaan sarana pendukung, seperti literatur tentang kearifan lokal masyarakat Lombok yang syarat dengan nilai harmoni sosial, maupun literatur tentang teknis atau prosedur pengembangan pembelajaran untuk internalisasi nilai. Selain itu, juga dibutuhkan alat pendukung pembelajaran seperti LCD yang dapat digunakan untuk menayangkan berbagai media pembelajaran yang diperlukan untuk itu. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut sulit diperoleh guru.

Kondisi tersebut seharusnya mendapat perhatian dari pihak sekolah dalam rangka memfasilitasi guru untuk memperoleh bahan yang diperlukan. Selain itu, guru juga harus punya inisiatif. Namun demikian, mengingat tidak semua guru punya kemampuan dan kemauan untuk itu maka sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi ketersediaan bahan yang diperlukan.

c. Kurangnya Kesiapan Belajar Siswa

Kurangnya kesiapan belajar siswa juga menjadi salah satu hambatan internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn SMP di Wilayah rawan konflik di Lombok. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, siswa justru disibukkan dengan hal-hal lain di luar aktivitas pembelajaran, seperti cerita dengan teman sebangku, bertanya kepada sesama teman tentang hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan pembelajaran.

d. Kurangnya Dukungan Lingkungan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya guru PPKn dalam internalisasi nilai harmoni sosial terkadang kurang mendapat dukungan dari pihak keluarga. Sebagai contoh ketika guru mengajak pihak keluarga agar bersama-sama menjaga dan menasehati siswa agar tidak terlibat konflik, justru pihak keluarga mendukung anak-anak mereka untuk terlibat sebagai wujud solidaritas dan tanggung jawab dalam menjaga kampung mereka dari serangan lawan.

Kondisi sebagaimana di atas tentunya menjadi hambatan bagi guru PPKn dalam internalisasi nilai harmoni sosial, karena salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan guru dalam upaya tersebut adalah dukungan pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan pandangan Micklewait dan Wooldridge (2000) yang menegaskan betapa pentingnya peran

orang tua untuk menjadikan anak-anak mereka sukses dan mampu mengaktualisasikan potensi mereka secara optimal. Dalam hal ini tentunya termasuk dalam mendukung tumbuh suburnya nilai-nilai kebersamaan, toleransi, kepedulian dan kasih sayang guna mewujudkan cita-cita kehidupan yang harmonis.

Kesimpulan

Potensi internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn meliputi: (1) potensi kurikulum, yang ditunjukkan dengan keberadaan KD mata pelajaran PPKn yang berorientasi pada internalisasi nilai harmoni sosial, antara lain KD kelas IX, meliputi : KD 1.4; Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, KD 2.4; Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya, KD 3.4: Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, (2) potensi kearifan lokal yang syarat dengan nilai harmoni sosial sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn.

Hambatanya internalisasi nilai harmoni sosial melalui pembelajaran PPKn meliputi: (1) kurangnya kompetensi guru, (2) keterbatasan sarana pembelajaran, (3) kurangnya kesiapan belajar siswa, (4) kurangnya dukungan keluarga siswa.

Referensi

- Supriadi, D. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Khilmiyah, A. 2005. Metode Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Diktilitbang.
- Hendar, J. H. 2011. Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan Sunda. Prosiding Konvensi Nasional Pendidikan IPS (Konaspipsi) ke 1. Bandung: FPIPS-UPI
- Joan, T.E. 1992. *Pluralism and Education: Its Meaning and Method*. dalam <http://www.ed.gov/database/ERIC Digest/ede347494.htm>, diunduh pada tanggal 12 Desember 1992.
- Keraf, A.S. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Lubis, H.N. 2001. Kearifan Tradisional Warisan Sejarah Sunda. Makalah pada Konferensi Internasional Budaya Sunda. Bandung.

Micklewait dan Wooldridge. 2000. *A Future Perfect: the Challenge and Hidden Promise of Globalization*. New York: Crown Publisher.

Muhaimin. 2005. Paradigma Pendidikan: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Balai Pustaka.

Miles, M.B., dan Huberman, A.M., 1984. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia

Ridwan, N.A. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Ibda': Jurnal Studi Islam dan Budaya*, vol.5, (1): 27-38.

Tilaar, H.A.R. 1989. Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.